

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
SEWA BELI ARMADA TAKSI
(Studi pada Koperasi Sopir Transportasi (Kosti) Solo)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun Oleh :

AMAD RIYADI
C 100060057

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

HALAMAN PENGESAHAN

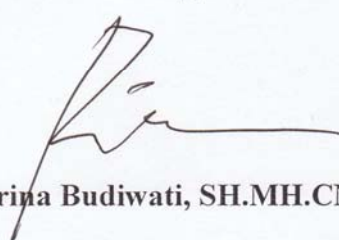
Artikel publikasi ilmiah ini telah diterima dan disetujui oleh Dewan Pembimbing
Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



(Nuswardhani, SH.SU)

Pembimbing II


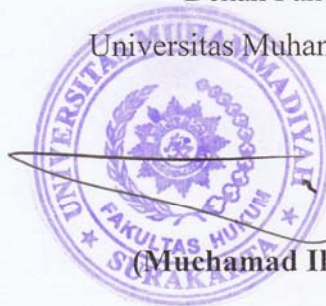


(Septarina Budiwati, SH.MH.CN)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Muchamad Iksan, S.H., M.H)

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : **AMAD RIYADI**

NIM : **C 100 060 057**

Fakultas/ Jurusan : **Hukum/ Ilmu hukum**

Jenis : **Skripsi**

Judul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN SEWA BELI ARMADA
TAKSI. (Studi pada Koperasi Sopir
Transportasi (KOSTI) Solo)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih median/ mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, Juli 2012

Yang Menyatakan


Amad Riyadi

ABSTRAKSI

Amad Riyadi, NIM : C100060057, Fakultas Hukum UMS, Surakarta, Th 2012, Judul : “TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN SEWA BELI ARMADA TAKSI (Studi pada Koperasi Sopir Transportasi (KOSTI) Solo)”

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli secara umum dan perjanjian sewa beli armada taksi secara khusus, mengetahui bagaimana hak dan kewajiban yang timbul dan mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum yang timbul dalam perjanjian Sewa Beli Armada Taksi di Kosti Solo. Demikian halnya dengan KOSTI Solo alat angkut kendaraan roda empat yaitu taksi yang berpusat di Mojosongo Surakarta telah membuka cakrawala baru bagi lapangan pekerjaan di bidang jasa armada taksi. Penelitian berlokasi di KOSTI sebagai tempat penelitian dengan menggunakan metode penelitian Empiris.

Dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat dan dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam perjanjian sewa beli armada taksi apabila terjadi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum maka pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat diminta tanggung jawab hukumnya untuk memberi ganti rugi. Hal ini dapat dibicarakan secara musyawarah atau melalui jalur hukum, yaitu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat.

Kata kunci : Perjanjian, sewa beli, armada taksi.

ABSTRACT

**Amad Riyadi, NIM: C100060057, Faculty of Law, UMS, Surakarta, Th 2012,
Title: "LIABILITY AGREEMENT TO BUY HIRE TAXI FLEET
(Cooperative Study on Transport driver (KOSTI) Solo)"**

The purpose of this study was to determine how the implementation of a hire purchase agreement in general and hire purchase agreements taxi fleet in particular, to know how the rights and obligations that arise and to know how the legal liability arising under the agreement in the Taxi Fleet Lease Purchase Solo Kosti. Likewise with Solo KOSTI conveyance cab four-wheel vehicle that is centered on Surakarta Mojosongo has opened new horizons for employment in the field of taxi services. Research located in KOSTI as a research site by using empirical research methods.

The results of research and discussion can be seen and can be concluded that, in the taxi hire purchase agreement if the default occurs and then the tort is committed may be asked his legal responsibility to compensate. This can be discussed in meetings or through legal channels, which filed the lawsuit in the local Court.

Keywords: Agreement, leasing, fleet taxis.

A. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan orang sejak jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk transportasi, salah satunya adalah transportasi darat, khususnya pada transportasi perkotaan yang merupakan bagian pembangunan dalam menjawab pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat seperti kota Solo. Dimana kota Solo sebagai kota budaya dan pariwisata diupayakan penyediaan pelayanan yang baik dalam bidang jasa armada umum, salah satunya kendaraan taksi. Sistem transportasi nasional ditata dan terus disempurnakan dengan didukung peningkatan sumber daya manusia sehingga terwujud pelayanan yang baik, serta disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi, kebijaksanaan tata ruang dan pelestarian lingkungan. Teknologi sangat berjasa meringankan beban manusia dalam memperpendek jarak tempuh, satu diantaranya adalah teknologi yang mencoba menjawab kebutuhan manusia menghadapi keterbatasan waktu yaitu alat angkut yang dalam hal ini alat angkut kendaraan roda empat yaitu taksi. Demikian halnya dengan Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) alat angkut kendaraan roda empat yaitu taksi yang berpusat di Mojosongo Surakarta telah membuka cakrawala baru bagi lapangan pekerjaan di bidang jasa armada taksi. Dimana dalam bidang jasa armada taksi ada pihak yang saling terkait dalam menjalankan jasa armada. Adapun pihak yang saling terkait tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemilik taksi; dan

2. Pengemudi taksi.

Dimana jasa transportasi sangat penting bagi pertumbuhan pembangunan Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak yang harus diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat, permasalahan ini dapat diprasaranai dalam suatu bidang usaha yaitu koperasi.

Salah satu usaha koperasi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) adalah kredit sewa beli armada taksi serta pelayanan transportasi taksi. Kemudian dengan sistem kredit sewa beli armada taksi koperasi tersebut memberikan hak kepada anggotanya untuk menyewa armada taksinya tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendidik para anggotanya supaya dapat mengkredit armada taksi tersebut dengan sistem sewa beli. Hal ini mengingat bahwa kebutuhan uang sangat vital dalam kehidupan kita, baik masyarakat kalangan atas maupun masyarakat kalangan bawah. Dan seakan-akan uang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Disamping itu sewa beli dapat digunakan untuk peningkatan penghasilan atau upah kerja dimana si pengemudi dapat mengoperasikan armadanya dengan ketentuan-ketentuan khusus. Untuk bisa memberikan kredit dengan sistem sewa beli, maka koperasi yang bekerjasama dengan bank mengenakan bunga yang relatif rendah, sehingga tidak memberatkan bagi yang mengambil armada taksi tersebut dengan cara sistem kredit sewa beli.

Pengertian dari istilah sewa beli itu sendiri yaitu merupakan campuran antara perjanjian sewa menyewa dari penjualan jual beli dimana perjanjian itu menganut sistem terbuka, di dalam sewa beli diadakan perjanjian dimana

pembeli tidak mampu membayar harga barang sekaligus dan diperbolehkan mencicil harga barang itu menjadi beberapa angsuran, sampai lunas atau terbayar semua angsurannya, baru pembeli yang mempunyai kedudukan sebagai penyewa mendapatkan hal milik berupa barang yang dibelinya secara penuh. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian baku yang syarat-syarat dalam perjanjian itu dibakukan, artinya ditetapkan sebagai tolak ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersarmada. Mengenai perjanjian sewa beli ini ada beberapa definisi dari para pakar di Indonesia diantaranya yaitu, sewa beli sebenarnya semacam jual beli, setidak-tidaknya sewa beli lebih mendekati jual beli daripada sewa menyewa, meskipun ia merupakan campuran dari keduanya dan diberikan jual sewa menyewa.

Sedangkan yang dimaksud dengan perjanjian sewa beli dalam armada taksi adalah perjanjian yang dilakukan oleh pihak perusahaan taksi yang berbentuk koperasi dengan para calon sopir taksi dimana pihak perusahaan menyewakan unit kendaraan atau mobil taksi dan calon sopir taksi memberikan uang setoran yang sesuai dengan apa yang tertera dalam draft perjanjian yang disepakati bersama oleh para pihak.

Dengan adanya keterkaitan antara kedua belah pihak tersebut dalam bidang jasa armada taksi mengakibatkan timbulnya tanggung jawab antara kedua belah pihak, pemilik taksi maupun pengemudi taksi. Sewa-beli adalah jual-beli, setidak-tidaknya mendekati jual-beli daripada sewa-menyewa, meskipun ia merupakan suatu campuran dari keduanya. Sewa-beli mula-mula

ditimbulkan ditemukan dalam praktek untuk menemukan persoalan bagaimanakah caranya memberikan jalan keluar apabila pihak penjual menghadapi banyak permintaan untuk membeli barangnya tetapi calon-calon pembeli itu tidak mampu membayar harga barang itu sekaligus.¹

Dari peristiwa ini timbullah suatu hubungan hukum antara dua pihak yang dinamakan perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan yang mengikatkan diri antara satu orang atau lebih terhadap suatu objek tertentu hal ini berarti bahwa kontrak menimbulkan adanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban diantara para pihak yang membuatnya. Seperti yang telah diuraikan di atas maka dalam suatu perjanjian para pihak wajib memperhatikan unsur-unsur sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata.²

Di Indonesia perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam suatu undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan perjanjian sewa beli tersebut. Karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi).³

Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW adalah sistem terbuka, artinya diakui adanya asas kebebasan berkontrak, seperti tercantum dalam Pasal 1338 BW. Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat mengadakan

¹Subekti, *Aneka Perjanjian* (cetakan x), PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995, hal 52

²M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung, 1986, hal 24.

³J. Satrio, *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni. 1992.

persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun KUHD.

Namun ketentuan-ketentuan umum BW Bk.III titel 1 s/d IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnyanya suatu perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW Bk.III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak.⁴

Dimana dalam pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁵

Dalam suatu perjanjian masing masing pihak memiliki hak dan kewajiban, begitu pula dalam perjanjian sewa beli armada taksi ini. Dimana yang menjadi hak bagi yang menyewakan (Kosti) yaitu menerima uang setoran setiap harinya dari para sopir taksi, sedangkan kewajiban yang menyewakan (Kosti) adalah menyerahkan unit kendaraan atau mobil untuk digunakan sebagai taksi. Di lain pihak yaitu pembeli (sopir taksi) memiliki hak untuk menikmati atau menggunakan kendaraan atau mobil untuk digunakan sebagai taksi dan memberikan balasan berupa kewajiban yaitu membayarkan setoran setiap harinya kepada pemberi sewa (Kosti). Maka timbulah hubungan timbal balik antara pemberi sewa (Kosti) dan pembeli (sopir taksi).

Dari uraian yang penulis uraikan tersebut di atas, banyak hal yang menarik untuk di selesaikan dalam praktik perjanjian kredit sewa-beli armada

⁴Sri Gambir Melati, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*. Bandung: Alumni.1999. Hal 3

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.1992, Hal 37.

taksi pada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI Solo) selain permasalahan wanprestasi antara kedua belah pihak baik itu pengemudi taksi sekaligus sebagai pemilik dengan penyedia layanan armada taksi yakni KOSTI Solo, adapula dikarenakan problematika dari sisi pengemudi dikarenakan tidak terpenuhinya pokok kredit dan bunga yang harus dibayarkan, setoran dan mengenai hal pemutusan perjanjian oleh satu pihak atas kesalahan debitur lalai atau mengenai upah yang sesuai dengan yang dikehendaki.

Menurut Mariam Darux Badruzaman, perjanjian kredit lahir dalam bentuk standar karena perbedaan sosial ekonomi kedua belah pihak dan untuk mendorong pelaku usaha ekonomi lemah. Dan kendaraan taksi yang merupakan salah satu transportasi sarana armada darat yang memberikan jasa armada kepada pemakai jasa (masyarakat) dalam hal mengangkut barang atau orang dengan tujuan memperoleh sejumlah imbalan berupa uang dan memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat. Walaupun demikian manusia tidak pernah berhenti menemukan cara-cara baru dalam menjawab segala kebutuhan hidup yang ada. Selain perjanjian kredit terhadap armada terdapat pula suatu perjanjian kerja secara tersendiri yang masih dalam satu kesatuan dengan perjanjian sebelumnya. Perhubungan kerja termasuk persetujuan atau perjanjian pada umumnya. Sebab pada umumnya seseorang yang melakukan prestasi kerja, dia akan memperoleh upah atas hasil kerja tadi sebagai tegenprestasi. Persetujuan kerja pada umumnya dapat dirumuskan sebagai berikut: suatu persetujuan antara pekerja/karyawan/buruh atau penerima kerja atau pemborong kerja sebagai pihak pertama mengikatkan diri untuk

menyerahkan tenaganya kepada yang menyuruh lakukan kerja atau pemberi borongan sebagai pihak kedua guna mendapat upah selama jangka waktu tertentu.⁶

Semua yang telah disepakati antara semua pihak ini menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dan bersifat mengikat. Dengan demikian apabila salah satu pihak lalai melaksanakan kewajibannya atau melakukan wanprestasi, maka pihak lain dapat menuntutnya di muka hakim, agar pihak yang wanprestasi bertanggung jawab memenuhi kewajiban atau prestasinya tersebut yang dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi menurut hukum. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo?
2. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian antara para pihak dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo?
3. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli antara para pihak dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo?
4. Tanggungjawab Hukum apa yang timbul dalam perjanjian sewa beli armada di Kosti Solo?

B. Proses Pelaksanaan Perjanjian Sewa Beli Armada Taksi di KOSTI SOLO

Dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo ini, proses perjanjiannya melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut :

1. Pendaftaran Menjadi Anggota Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI).

⁶M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni 1986, hal 245.

Adapun yang menjadi syarat – syarat untuk mendaftar sebagai anggota koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Yang bersarmada mengajukan permohonan,
- b. Menyerahkan Foto Copy SIM umum denan memperlihatkan aslinya,
- c. Berusia minimal 22 tahun atau maksimal 45 tahun,
- d. Menyerahkan Foto Copy KTP dan KK yang masih berlaku dangan memperlihatkan aslinya,
- e. Dengan menyerahkan SKCK asli dari Kepolisian,
- f. Menyerahkan Foto Copy Ijazah minimal SMP dengan memperlihatkan aslinya,
- g. Menyerahkan pas photo berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar,
- h. Menyerahkan daftar riwayat hidup,
- i. Mengisi formulir pendaftaran,
- j. Menyerahkan surat sehat jasmani dari dokter,
- k. Yang bersarmada tidak terikat dengan instansi lain.

Apabila syarat – syarat tersebut terpenuhi maka calon anggota dapat terdaftar menjadi anggota koperasi. Dan mendapatkan satu armada taksi yang pembayaranya dilakukan secara setoran disetiap harinya.

2. Pengajuan Angka Kredit Kepada Koperasi Sopir Transportasi Solo (KOSTI).

Dalam hal ini mengisi draft perjanjian, isi formulir atau draft perjanjian tersebut hanya dibuat oleh salah satu pihak saja, dalam hal ini dibuat oleh pihak Koperasi Sopir Transportasi Solo sehingga pihak

anggota tinggal menandatangani draft tersebut apabila setuju dengan apa yang tertulis dalam draft perjanjian sewa beli armada taksi tersebut.⁷

3. Penentuan Besar Setoran Setiap Harinya.

Proses perjanjian sewa beli armada taksi antara pihak pengurus koperasi dan anggotanya, tentu saja harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tentang syarat sahnya perjanjian pada umumnya yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu bahwa untuk syarat sahnya perjanjian harus memenuhi:⁸

C. Bentuk dan Isi Perjanjian Antara Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Beli Armada Taksi di Kosti Solo.

Di dalam perjanjian sewa beli armada taksi ini bentuk perjanjiannya adalah termasuk dalam perjanjian standart yang artinya adalah perjanjian yang berbentuk tertulis maupun formulir yang isinya telah distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen, serta bersifat massal tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki para pihak yang bekerja sama.⁹

D. Pelaksanaan perjanjian sewa beli antara para pihak dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.

Setelah kesepakatan antara semua pihak yang terlibat tercapai dengan tanda ditandatanganinya draft perjanjian sewa beli armada taksi. Maka

⁷ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1992, Hal. 43

⁸ Handri. R, *Hukum Perjanjian di Indonesia, opchit* Hal. 47.

⁹ Djaja S, Meliala. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia. 2007. hal 90.

masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajiban yang tertera dalam draft perjanjian tersebut.

Kewajiban anggota Koperasi Sopir Transportasi Solo KOSTI SOLO adalah :

10

1. Mematuhi dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan khusus, rapat anggota, serta keputusan rapat pengurus.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Sopir Transpoertasi Solo KOSTI SOLO.
3. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.
4. Wajib melakukan setoran setiap hari operasional dan memantau setoran yang dilakukan oleh pengemudi cadangan atas armada tersebut yang telah menjadi tanggung jawabnya.
5. Anggota harus tunduk pada semua ketentuan tata tertib pengoperasian armada taksi yang telah diterbitkan oleh pihak Koperasi.

Adapun ketentuan mengenai kewajiban anggota Koperasi Sopir Transpoertasi Solo (KOSTI) SOLO akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi.

I. Hak dari anggota Koperasi Sopir Transpoertasi Solo KOSTI SOLO
adalah:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota.

¹⁰ Buku Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga KOSTI SOLO hal 4, tahun 1994

- b. Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus.
- c. Menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar rapat baik diminta maupun tidak.
- e. Memintakan diadakan rapat anggota menurut ketentuan anggaran dasar.
- f. Memenfaatkan Koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama.

II. Kewajiban dari pihak Koperasi Sopir Tranportasi Solo KOSTI SOLO adalah:¹¹

- a. Memimpin organisasi secara kolektif.
- b. Mengajukan rencana kerja dan anggaran Koperasi.
- c. Menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota.
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pengelolaan segala usaha Koperasi dan pengelolanya.
- g. Menyetorkan atau membayarkan uang setoran yang diterima tersebut kepada Bank BPD DIY.

III. Hak dari pihak Koperasi Sopir Tranportasi Solo KOSTI SOLO adalah :

¹¹ Sulistyio, wawancara pribadi. Kosti Solo.Surakarta : 4-5-2012

- a. Menerima uang dana penyertaan sebesar Rp. 20.000.000- (dua puluh juta rupiah) dari hasil penjualan armada kosti solo dari pihak anggota Koperasi.
- b. Merima setoran pada setiap harinya yang diberikan oleh anggota Koperasi.
- c. Berhak merima bunga sebesar 6 % dari pihak anggota apabila terjadi minus anggota.

Setelah draft atau formulir perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo itu ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat. Maka, secara otomatis telah terjadi kesepakatan bersama antara para pihak.

E. Tanggung Jawab Hukum yang ada dalam Perjanjian Sewa Beli Armada Taksi di Kosti Solo.

Tanggung jawab hukum timbul karena ada yang melakukan kesalahan dengan sengaja dalam ini melanggar perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo. Kesengajaan tidak memenuhi tanggung jawab dapat disebut wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, dan overmach. Yang termasuk dalam hal tersebut yaitu : ¹²

a. Wanprestasi

Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan, tanpa halangan, tanpa kekuranganya.

¹² Sulistyio, wawancara pribadi. Kosti Solo.Surakarta : 4-5-2012

Adapun dasar hukum yang digunakan untuk melakukan peremajaan kembali adalah ketentuan pasal 6 dalam perjanjian sewa beli armada taksi Kosti Solo. Dari wawancara yang dilakukan dengan pengurus Kosti Solo diketahui bahwa alasan dilakukannya peremajaan dan pengalihan armada taksi agar pemegang armada dapat memenuhi prestasi yang tidak dapat dipenuhi oleh pemegang armada yang lama.

b. Perbuatan Melanggar Hukum.

Dalam isi draft perjanjian dilarang untuk mengubah keadaan fisik atau dalam armada, jika diketahui maka akan dikenai sanksi. Menurut pengurus Kosti hal ini pernah terjadi Di Kosti Solo. Adapun penyelesaian yang dilakukan adalah pihak pemilik armada harus mengembalikan bentuk yang semula sehingga yang ditempuh adalah dengan jalan damai, namun jika pihak anggota tidak dapat memberikan ganti rugi yang diminta maka pihak Kosti berhak untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Surakarta.

c. Overmacht.

Dalam peristiwa ini tanggungjawab hukum secara otomatis tidak dikenakan kepada pihak anggota yang areanya terkena banjir, yang berarti anggota tidak diwajibkan mengganti setoran yang tertunda akibat banjir pada lain hari atau menutup setoran pada akhir bulan yang sudah ditentukan akan tetapi tidak dikenai denda.

d. Risiko.

Risiko yaitu kewajiban memikul kerugian yang timbul karena keadaan memaksa. Hal ini dipermasalahkan karena baik pihak Kosti maupun pihak anggota tidak bersalah.

Dalam penelitian perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo ini, peristiwa tersebut sudah pernah terjadi, diantaranya pada saat pengoperasian armada di jalan armada tersebut mengalami kerusakan maka risiko ditanggung oleh pihak anggota karena peristiwa tersebut terjadi setelah ditandatanganinya draft perjanjian. Disisi lain jika kerusakan armada terjadi sebelum penandatanganan draft perjanjian antara kedua belah pihak maka risiko ditanggung pihak Kosti.

Adapun ganti rugi yang ada dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo adalah :

1) Ganti rugi perdamaian

Ganti rugi yang harus dibayarkan apabila penyelesaiannya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan atau perdamaian antara pihak pemilik armada dengan pihak pengurus Kosti, dengan jalan musyawarah dan apabila perdamaian tersebut tidak dapat terlaksana maka, dirempuh melalui Pengadilan Negeri Surakarta dengan berdasarkan pertimbangan hakim.

2) Ganti rugi berdasarkan pertimbangan hakim.

Ganti rugi ini adalah ganti berdasarkan putusan hakim karena pihak yang dirugikan telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara.

F. PENUTUP

Kesimpulan

1. Proses perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.
 - a. Sebelum terjadi pelaksanaan perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo, pihak kosti menyerahkan formulir yang harus di isi oleh calon anggota, selain itu ada beberapa syarat lain untuk calon anggota koperasi.
 - b. Setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi oleh calon anggota yang mengajukan angka kredit, maka terjadilah perjanjian sewa beli armada taksi dalam beberapa tahap mulai dari pendaftaran calon anggota hingga pelaksanaan isi perjanjian
 - c. Bahwa, kesepakatan terjadi apabila calon anggota setuju dengan isi draft yang dibuat oleh pihak Pengurus Kosti Solo, maka calon anggota menandatangani draft perjanjian tersebut dan setelah semua pihak sudah menandatangani perjanjian tersebut maka perjanjian dianggap sah dimata hukum.
2. Bentuk dan isi perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.
 - a. Bahwa, perjanjian ini disebut dengan perjanjian standart karena draft perjanjian hanya dibuat oleh satu pihak saja yaitu pihak pengurus Kosti Solo dan pihak anggota yang mengajukan angka kredit dan tinggal menandatanganinya apabila setuju dengan isi draft perjanjian tersebut.

- b. Adapun isi perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo adalah Keterangan mengenai subjek perjanjian, adanya pasal pasal perjanjian dan sub sub nya yang nantinya akan disepakati bersama oleh para pihak, aturan-aturan yang nantinya harus dipatuhi oleh para pihak yang terlibat, sanksi-sanksi apa saja yang diberikan oleh para pihak jika telah melakukan wanprestasi/perbuatan melawan hukum, ketentuan apa saja yang bisa dilakukan atau boleh dilakukan jika terjadi hal diluar dugaan, berisi pula mengenai definisi dari hal-hal yang berkaitan dalam perjanjian sewa beli, berisi pokok-pokok perjanjian yang disepakati.

3. Pelaksanaan perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.

Dalam perjanjian sewa beli armada taksi ini pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati antara para pihak, maka masing-masing pihak yaitu pihak Pengurus Kosti Solo dengan pihak anggota harus melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.

4. Tanggung jawab hukum yang ada dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti Solo.

Apabila terjadi wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dalam perjanjian sewa beli armada taksi di Kosti, maka pihak yang melakukan wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum dapat dimintai tanggungjawab hukumnya untuk memberi ganti rugi. Hal ini dapat dibicarakan secara musyawarah (perdamaian), atau melalui jalur hukum yaitu pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surakarta.

Saran

1. Kepada calon anggota disarankan untuk mengambil armada taksi yang sesuai dengan besar setoran dan besar angsuran yang sesuai dengan kemampuannya, sehingga akan terhindar dari wanprestasi.
2. Kepada pemilik armada disarankan untuk tidak memindahtangankan armada yang belum lunas setorannya kepada pihak lain karena itu adalah perbuatan yang dilarang dalam perjanjian, sehingga pemilik armada dapat digugat secara hukum karena termasuk dalam perbuatan melanggar hukum.
3. Kepada pengurus Kosti disarankan untuk berhati-hati dalam menerima permintaan pengajuan kredit, sebaiknya pihak pengurus Kosti melakukan survey terlebih dahulu terhadap calon anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Buku Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga KOSTI SOLO tahun 1994

Djaja S, Meliala. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan. Bandung: Nuansa Aulia. 2007

J Satrio, *Hukum Perjanjian, Cetakan I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992

M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni: Bandung, 1986, hal 24.

Raharjo, Handri. Hukum perjanjian di Indonesia. PT. Pustaka Yustisia Yogyakarta. tahun 2009

Subekti, *Aneka Perjanjian* (cetakan x), PT Citra Aditya Bakti: Bandung, 1995, hal 52

Sri Gambir Melati, *Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*. Bandung: Alumni. 1999. Hal 3

Perundang-undangan

KUH Perdata

Keputusan menteri perdagangan dan koperasi Nomor 34/KP/II/80 tentang Perizinan Sewa Beli (hire purchase)

Internet

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan>

<http://id.shvoong.com/social-sciences/1997495-data-primer/#ixzz1nmK5bHdm>